

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada penjelasan sebelumnya, maka dalam penulisan ini dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Evaluasi kebijakan pemekaran wilayah sangat penting untuk menilai efektivitas dan keberhasilannya dalam mencapai tujuan pelayanan public di Kelurahan OI Mbo. Tujuan umum dari pemekaran wilayah Kelurahan Oi Mbo adalah untuk meningkatkan efisiensi administratif, memperluas cakupan pelayanan publik, dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan. Evaluasi harus dilakukan untuk menilai apakah pemekaran wilayah telah meningkatkan efektivitas administratif. Hal ini dapat dilihat dari perbaikan dalam pengelolaan sumber daya manusia, infrastruktur, dan sistem administrasi pemerintahan. Pemekaran wilayah Kelurahan Oi Mbo telah meningkatkan akses penduduk terhadap layanan kesehatan, pendidikan, infrastruktur, dan fasilitas umum lainnya.
2. Adapun faktor pendukung evaluasi kebijakan publik melalui pemekaran Wilayah Kelurahan oi mbo yaitu;
  - Realitas geografis membuat jarak antara pusat pelayanan dengan masyarakat semakin terlihat, sesuai dengan hakikat pelayanan publik yang harus selalu mengakar di masyarakat. Ruang ini menciptakan

kedekatan sosiologis dan psikologis antara mesin dengan masyarakat, sehingga penyakit birokrasi yang menghambat pelayanan publik dapat dikurangi.

- Anggaran atau penyaluran dari kecamatan ke kelurahan membutuhkan alokasi dana yang cukup untuk daerah. Hal yang sama juga terjadi di Kelurahan Oimbo. Penyaluran dana secara mandiri meningkatkan kualitas pelayanan publik .

## 5.2 Saran

Mengenai pelayanan administrasi Kantor Kelurahan Oimbo, masyarakat sangat menginginkan pelayanan yang berkualitas. Walaupun kualitas pelayanan publik di Kantor Kelurahan Oimbo sudah dapat dikatakan baik, namun ada beberapa hal yang sedikit perlu dibenahi untuk meningkatkan kualitas pelayanan di masyarakat, seperti upaya peningkatan sarana dan prasarana (komputer, laptop, printer).

Pemerintah wilayah kelurahan Oi Mbo telah berupaya keras dalam kualitas layanan untuk memastikan kepuasan masyarakat. Hal ini terlihat dari hasil wawancara terhadap laporan kepada informan. Aspek kepatuhan terhadap semua peraturan yang mendasari sektor pekerjaan, aspek kejelasan yang mencakup prosedur pelayanan yang baik dan rincian biaya atau biaya perawatan yang tidak mahal dan dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat di oi mbo. Sebaiknya pihak kelurahan meningkatkan penyebaran brosur prosedur pelayanan di kantor kelurahan Oi Mbo agar masyarakat mengetahui prosedur administrasi dan tidak ada kesan campur aduk kepentingan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdulwahab S. (2009). *Analisis Kebijakan : Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Aprian, dkk. (2013). TANTANGAN PEMANFAATAN RUANG PESISIR PANTAI KOTA MATARAM SEBAGAI DESTINASI WISATA . *Jurnal Ilmu Administrasi Publik Volume 10, Nomor 2*, 127-134.
- Arikunto, S. (2002). *Prosedur Penelitian*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Banoet, C. (2013). EVALUASI KEBIJAKAN PEMEKARAN KECAMATAN YANG BERBASIS PELAYANAN PUBLIK PADA SEKTOR PENDIDIKAN. *ARENA HUKUM Volume 6, Nomor 3*, 290-452.
- Bungin, B. (2010). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Dimas Ratu Tiemority, Didik Gunawan Suharto. (2021). Aspek Administrasi dan Politik dalam Kebijakan Pemekaran Kelurahan di Kota Surakarta. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik UMA, 9 (1)*, 47-56.
- Dunn, William. (2000). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik, Edisi Kedua*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Frans M. parera, d. (2000). *Demokrasi dan Otonomi, mencegah Disintegrasi Bangsa*. Jakarta: PT. Kompas media Nusantara.
- Hasriani. (2016). *studi dampak pemekaran wilayah terhadap kesejahteraan masyarakat di desa Tafagapi Kecamatan Menui kepulauan kabupaten Morowali*. Kendari: Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis.

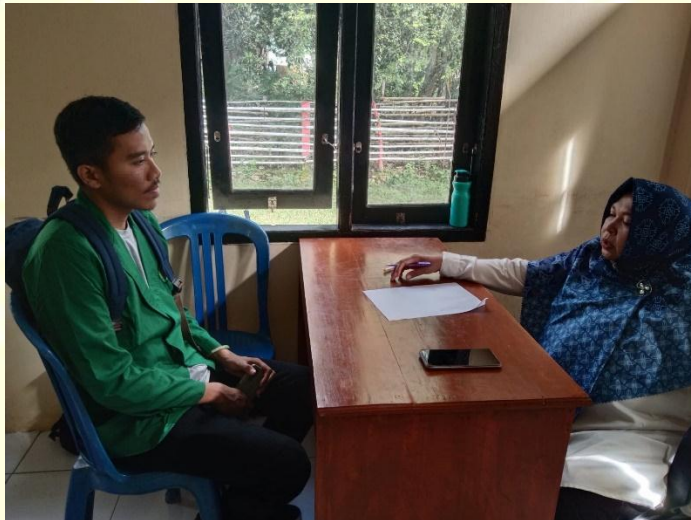
- Kusumawardani, Y. S. (2015). Pelaksanaan Kebijakan Pemekaran Kelurahan Akcaya Kecamatan Dintang Kabupaten Sintang. *Governance Jurnal SI Ilmu Pemerintahan Vol 4 No. 3*, 1-10.
- Moleong, L.J. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Mulyadi, Deddy. (2015). *Study Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Novita Tresiana. (2015). RASIONALITAS KEBIJAKAN PEMEKARAN KECAMATAN DAN KELURAHAN DI KOTA BANDAR LAMPUNG. *Jurnal Bina Praja Volume 7 Nomor 2*, 161 - 172.
- Nurcholis, Hanif. (2007). *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*. Jakarta: PT.Gramedia Widia Sarana Indonesia.
- Rohidi,R dan Mulyarto,T. (1992). *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: UI-Press.
- Setiawan, E. (2016). Evaluasi Pemekaran Desa Pampang. *Governance Jurnal SI Ilmu Pemerintahan Vol. 5 No. 4*, 1-15.
- Subarsono. (2005). *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, CV. Alfabeta Bandung
- Wahdini, Y. (2015). DUKUNGAN DAN PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP WACANA PEMEKARAN RUMBAI TAHUN 2014 . *Jom FISIP Volume 2 No.2*, 1-11.
- Winarno, Budi. (2016). *Kebijakan Publik di Era Globalisasi : Teori, Proses, dan Studi Kasus Komparatif*. Yogyakarta: CAPS.



## DOKUMENTASI



KATARA





**UNIVERSITAS MUHAMMADYAH MATARAM  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK**

Jln. KH. Ahmad Dahlan No. 1 Telp. 639180-633723 Mataram

**KARTU KONSULTASI**

Nama Mahasiswa : Muhammad Phalevy  
 NIM : 218130064  
 Program Studi : Ilmu Pemerintahan  
 Pembimbing I : Drs. Amil, M.M

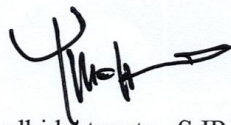
No	Hari dan Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf Pembimbing
1	15-6-23	- Baku secara umum - Pengitikan huruf Kapital agar diper-	
2		hentikan / perbaiki - Tampilkan data dalam bentuk tabel	
3	22-6-23	Acc with ringi	
4			



5			
6			
7			
8			
9			
10			

Mengetahui,

**Ketua Program Studi**



Yudhi Istanata., S.IP., M.IP  
NIDN. 0827118801

**Dosen Pembimbing I**



Drs. Amil M.M  
NIDN. 0831126204





UNIVERSITAS MUHAMMADYAH MATARAM  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK

Jln. KH. Ahmad Dahlan No. 1 Telp. 639180-633723 Mataram

**KARTU KONSULTASI**

Nama Mahasiswa : Muhammad Phalevy

NIM : 218130064

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Pembimbing II : Muhammad Aprian Jailani, S.AP., M.AP

No	Hari dan Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf Pembimbing
1	19 - 6 - 2023 keluar 15 - 6 - 2024	1. Data sekilas primer blm ada 2. sistematika diperbaiki 3. Metoda masih belum proposal.	
2		Revisi aturan dari penelitian & publikasi	
3		Revisi sistematika penelitian	
4		Belum proposal maka Lynda	
5			
6		Acc	

7			
8			
9			
10			

Mengetahui

**Ketua program studi**



Yudhi Istanata, S.IP., M.IP  
NIDN. 0827118801

**Dosen Pembimbing II**



Muhammad Aprian Jailani, S.AP., M.AP  
NIDN. 08049501

